

**GERAKAN POLITIK HIZBUT TAHRIR INDONESIA DALAM  
PERSPEKTIF FILSAFAT NICCOLO MACHIAVELLI**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



**OLEH :**

**AHMAD FARUK**

**NIM : E01215002**

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2020**

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Ahmad Faruk  
NIM : E01215002  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Januari 2020

Saya yang menyatakan



AHMAD FARUK  
NIM. E01215002



### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia Dalam perspektif Filsafat Politik Niccolo Machiavelli” yang ditulis oleh Ahmad Faruk ini telah disetujui pada tanggal 9 Januari 2020

Surabaya, 9 Januari 2020

Pembimbing I



Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si  
NIP: 196909071994032001

Pembimbing II



Dr. H. Ainur Rofiq al-Amin, M.Ag  
NIP: 197206252005011007

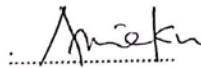


### PENGESAHAN SKRIPSI

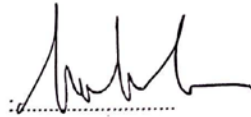
Skripsi berjudul “Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia Dalam perspektif Filsafat Politik Niccolo machiavelli” yang ditulis oleh Ahmad Faruk ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 13 Januari 2020

#### Tim Penguji

1. Dr.Hj. Aniek Nurhayati, M.Si

.....  


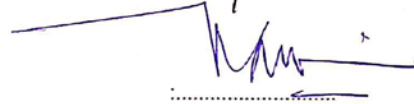
2. Dr.H. Ainur Rofiq al-Amin, M.Ag

.....  


3. Dr.Mukhammad Zamzami, Lc., M.Fil.I

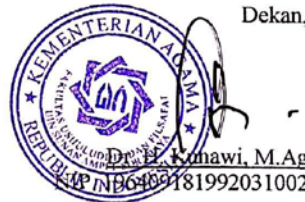
.....  


4. Dr. Rofhani, M.Ag

.....  


Surabaya, 13 Januari 2020

Dekan,





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Faruk  
NIM : E01215002  
Fakultas/Jurusan : ushowddin dan filsafat  
E-mail address : Farukachy@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia dalam perspektif Filsafat

Politik Niccolò Machiavelli

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12.3.2020 .

Penulis

(  Ahmad Faruk )  
nama terang dan tanda tangan































				Indonesia.
Jonkenne di	Gerakan Hizbut Tahrir dan Realitas Politik Islam Kontemporer di Indonesia	Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi	Juni 2012	Menjelaskan proses demokratisasi yang tidak hanya ditandai dengan munculnya partai politik baru, dan juga kelompok yang mengidentifikasi dirinya sebagai gerakan keagamaan. Penelitian ini memaparkan bahwa Kelompok formulis berkepentingan mengaitkan Islam dan negara secara legal formal, sedangkan kelompok substansialis lebih mengedepankan substansi Islam dalam negara.
Masdar Hilmy	Akar-akar transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia	Islamica: Jurnal Study Keislaman	September 2011	Menjelaskan akar “transnasiona Islam” atau “Islam transnasional” di Indonesia.
Mohamad Topan	Kekuasaan Menurut Taqiyudin an-Nabhani dalam Tinjauan Etika Politik	Jurnal Filsafat	Agustus 2013	Menjelaskan dasar konsepsi legitimasi kekuasaan yang ditinjau dari segi teori etika politik, dan untuk mengetahui relevansinya bagi gerakan politik Hizbut tahrir di Indonesia.
Nilda Hayati	Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia	Epiteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman	Juni 2017	Menjelaskan bagaimana Hizbut Tahrir menyebar luaskan doktrin khilafahnya, organisasi tersebut menggunakan berbagai media komunikasi. Penelitian ini menjelaskan ayat al-Quran sebagai landasan konsep khilafah, dalam jejaring komunikasi ditengah pergumulan media massa. Disini HTI berusaha menegakkan sistem negara khilafah sesuai





















Raja dan Presiden. Sifat-sifat yang beragam itu tidak hanya mengacu pada sifat baik semata, seperti lemah lembut dan penyayang, melainkan juga sifat kejam dan keras. Sehingga *virtu* yang baik dari seorang pemimpin masih tidak jelas. Namun dengan beberapa jabaran nanti bisa membantu mengurai sifat itu yang masih umum dan tidak jelas. Mengapa demikian? Karena Machiavelli lebih memilih *virtu* daripada *fortuna* (nasib baik), karena *fortuna* adalah nasib yang tidak pasti dan mutlak, sehingga ketergantungan pada *fortuna* semata, bagi Machiavelli, merupakan kesalahan besar dari seorang pemimpin.

*Virtu* dan *fortuna*, berdasarkan analisis panjang dan mendalam, merupakan cermin dan pijakan dari seluruh pandangan politik Machiavelli dalam bukunya yang berjudul *Sang Penguasa*. Oleh karena itu, di sini penulis mencoba mengkonsep *virtu* dan *fortuna* terkait beberapa pandangan politiknya.

## **B. Pandangan Politik Machiavelli**

Dalam buku *Sang Penguasa* terdapat dua kalimat dari Machiavelli setelah ia melakukan penelitian dan perenungan selama 7 tahun tentang politik dan kekuasaan yang mana hal tersebut bisa berlaku secara umum di semua negara. Ia mencatat bahwa pertama, kekuasaan di dalam sebuah negara pada masa silam (terutama Kekaisaran Romawi) sering kali terulang di generasi selanjutnya. Catatan tersebut benar adanya jika kita sedikit mengacu ke negara Indonesia yang pernah terjajah oleh negara asing selama ratusan tahun. Praktik-praktik kolonialisme sampai saat ini masih melekat di lembaga-lembaga pemerintahan. Kolonialisme dalam bentuk yang berbeda namun tetap menjajah negara ini secara ilegal, seperti korupsi, konspirasi gelap antar pebisnis dan pejabat pemerintah,

















kekuasaannya (sebagai pemimpin atau raja) dengan membuat angkatan bersenjata, beraliansi dengan negara-negara lain, memecat anggotanya yang berkhianat, dan membuat sistem hukum yang bisa menjamin kesejahteraan dan keadilan masyarakatnya. Dalam hal ini, tidak menambah kekuasaan seseorang yang sudah kuat agar kekuasaan sang raja atau pemimpin tidak tergilas oleh mereka yang bertambah kekuasaannya.

Mengacu pada Indonesia sebagai negara hukum yang mana praktik korupsi sering terjadi, ketidakadilan, dan dehumanisasi merupakan tanda kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku. Tanpa kekuasaan, mereka tidak dapat korupsi, tidak adil, dan dehumanisasi. Pejabat negara yang korupsi menyalahgunakan kekuasaannya, pelaksana hukum menggunakan kekuasaannya untuk menjadikan hukum sebagai produk jual beli. Fakta ini menunjukkan, jika kekuasaan jatuh kepada orang yang salah akan berakibat fatal. Oleh karena itu Machiavelli menyarankan agar kekuasaan raja atau pemimpin negara lebih kuat daripada yang lain.

Ketiga, “tidak memasukkan ke dalam negara seorang raja asing yang sangat kuat.” Dan keempat, “harus tinggal di negaranya sendiri.” Bagaimana berkuasanya seorang raja atau pemimpin, ia harus tetap tinggal di negaranya sendiri.

### 3. Memerintah Kota Yang Baru Ditaklukkan

Buku *Sang Penguasa* memiliki konteks yang berbeda dengan sekarang. Dahulu raja sering melakukan perluasan wilayah kekuasaannya

















































*Kedua*, politik dalam dan luar negeri adalah tanggung jawab seorang khalifah, dia mempunyai hak penuh untuk mengangkat para pimpinan militer serta mengumumkan perang atau damai. Tentu hal ini berbeda dengan kebijakan pemerintah Indonesia bahwa perang harus perlu persetujuan dari DPR.

*Ketiga*, khalifah berwenang atas duta besar asing, dia bisa menerima atau menolak duta besar asing dan bisa mencopotnya sewaktu-waktu.

*Keempat*, para wali dan para *muawin* ditentukan dan dicopot oleh khalifah, seorang khalifah tanpa perlu klarifikasi kepada siapapun untuk memecat para wali dan *muawin*.

*Kelima*, khalifah yang memilih dan memecat para panglima perang, direktur negara, *qadi al muzallim* dan lain sebagainya. Disini yang bisa memecat khalifah adalah *qadi al muzallim*, dan *qadi al muzallim* bisa kapan saja dipecat oleh khalifah. Tentu disini khalifah lah yang akan memecat lebih dulu *qadi al muzallim* apabila sudah tidak sepaham lagi dengan pemikirannya, Karena mengingat pemegang tunggal kekuasaan adalah khalifah.

*Keenam*, APBN juga ditentukan oleh khalifah melalui hukum syariah baik itu pemasukan atau pengeluarannya. Dalam anggaran belanja negara, hanya khalifah yang mempunyai wewenang tanpa campur tangan dari pihak lain. Disini terlihat jelas bahwa khalifah memiliki posisi yang sangat kuat terhadap masalah keuangan, hal yang demikian tentu saja menjadi peluang dan rawan dengan adanya korupsi dan praktek manipulasi.

Di Indonesia banyak pihak khususnya umat Islam salah paham atau gagal paham dalam menilai HTI, kesalahpahaman pertama adalah menilai HTI sebagai







memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya agar tetap langgeng. Kita juga melihat itu pada politiknya HTI dengan mengesampingkan moralitas demi mewujudkan cita-citanya, seperti, HTI melihat politik yang terjadi sekarang ini merupakan politik produk kafir yang sedang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Mereka mengatakan bahwa politik produk kafir tidak akan membawa Indonesia pada kemajuan suatu negara. HTI melihat Indonesia dalam realitasnya sedang dijajah oleh pihak barat, misalkan mereka melihat Indonesia sedang dicuri kekayaan alamnya seperti PT. Freport yang dikuasai oleh pihak asing, dan respon pemerintah hanya mendiamkannya dan seolah-olah tidak mau tahu.

Dalam hal ini, mereka tidak mempertimbangkan moralitas dalam urusan politik. Mereka selalu menggunakan kata “kafir” untuk merespon isu-isu politik yang terjadi di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan pernyataan mereka yang mengklaim bahwa, HTI dalam menjalankan tugas-tugas politiknya selalu berdasarkan nilai-nilai keislaman. Disini mereka menafikan nilai-nilai keislaman, sehingga mereka menggunakan cara apapun untuk kepentingan politiknya. Sama halnya dengan Machiavelli yang mengesampingkan moralitas dalam urusan politik. Menurutnya negara itu lebih penting dibandingkan apapun, karena urusan negara itu levelnya adalah paling tinggi.







### **C. Politik Ketakutan Hizbut Tahrir Indonesia**

Politik ketakutan merupakan strategi politik Machiavelli. Konsep ini dioperasikan dengan cara menimbulkan rasa takut kepada masyarakat melalui kekerasan, intimidasi dan ancaman. Menurutnya lebih baik ditakuti daripada dicintai. Puncak ketakutan ini adalah kesetiaan kepada penguasa. Dalam analisis penulis, konsep tersebut bisa ditemukan dalam strategi politik HTI. Organisasi masyarakat keislaman yang terjun ke dalam dunia politik ini melakukan segala cara dalam meraih kekuasaan termasuk politik ketakutan. Berbeda dengan konsep ketakutan Machiavelli, HTI menakut-nakuti masyarakat secara psikis melalui keyakinan keagamaan mereka. Beberapa contoh yang mereka dengungkan ialah bahwa negara Indonesia adalah negara kufur, dan masyarakat yang menolak konsep khilafah yang ditawarkan HTI adalah dosa besar dan dianggap telah melakukan perbuatan maksiat yang paling besar. Strategi ini tidak lain adalah untuk memperoleh dukungan dari penduduk Indonesia yang beragama Islam. Oleh karena itu, Machiavelli menyimpulkan bahwa ketakutan selalu tepat digunakan, seperti halnya kekerasan yang secara efektif dapat mengontrol legalitas.

Ada perbedaan mendasar epistemologis yang menjadi latar belakang penegakan politik ketakutan antara Machiavelli dan HTI. Machiavelli berangkat dari latar belakang keresahan terhadap sifat manusia secara umum. Menurut Machiavelli manusia pada umumnya tidak tau terima kasih, mencla-mencle, suka menyembunyikan sesuatu, segera ingin melepaskan diri dari bahaya, dan tamak. Maka untuk menghadapi kondisi manusia semacam itu, lebih baik ditakuti



Contoh lain di luar gerakan politik HTI bisa dilihat dari pilpres 2019. Jika kita melihat belakangan ini persoalan moral dalam kampanye politik menjadi hal yang saling beririsan, ketika tujuan kekuasaan membenarkan segala cara, maka hoaks, fitnah, dan kebohongan sering kali mendapatkan pembedanya. Sementara kandidat yang bertarung justru mengkapitalisasi isu moral, mereka tidak ingin disebut Machiavellian, karena istilah tersebut identik dengan hal-hal yang tidak bermoral.

Namun pada praktiknya, mereka justru melakukan cara-cara tersebut. Jokowi misalnya adalah sosok yang berangkat dari status yang disukai oleh masyarakat, namun ia juga semakin tegas dan keras dengan istilah *genderuwo* dan *sontoloyo*. sang petahana mengkapitalisasi politik hukum, salah satunya dalam kasus perppu ormas. Menurut penulis hal ini dianggap linear dengan pemikiran Machiavelli dimana tujuan stabilitas kekuasaan berbenturan dengan prinsip kebebasan berserikat dalam demokrasi. Sementara dari pihak oposisi, Prabowo juga sosok yang bercitra kuat, ia menggunakan politik kebocoran kekayaan negara dan kehancuran bangsa sebagai alat politiknya. menurut penulis hal ini sesuai dengan prinsip kekuasaan Machiavelli tentang politik ketakutan. Dan Prabowo menggunakannya untuk meraih dukungan politik. Jika tidak bisa meraih keduanya lebih baik ditakuti dari pada dicintai, demikian kata Machiavelli.

Untuk itulah Machiavelli menyarankan seorang penguasa hendaknya tidak mengutamakan legitimasi moral dan religius, melainkan fokus terhadap kekuasaan stabil menjadi stabil. Dengan itu stabilitas kekuasaan dan politik akan mengarah juga pada stabilitas negara. Stabilitas negara yang baik juga mengarah













